

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori Dan Konsep

Manajemen Praktik kerja lapangan untuk meningkatkan kompetensi siswa di SMK ini memiliki fokus bahasan utama sebagai landasan dalam penyusunan penelitian. Landasan utama yang digunakan pada penelitian ini ini memuat berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan pengelolaan Praktik Kerja Lapangan serta peningkatan kompetensi siswa pada pendidikan kejuruan. Pembahasan teori difokuskan pada konsep manajemen pendidikan, pengelolaan program PKL di Sekolah Menengah Kejuruan, serta teori mengenai pengembangan kompetensi peserta didik sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

1. Teori Manajemen

Istilah manajemen secara etimologis berasal dari bahasa Prancis kuno *management* yang merujuk pada aktivitas mengatur atau mengelola suatu pekerjaan. Dalam perkembangan terminologi modern, manajemen dipahami sebagai proses pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara terencana untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sama halnya dengan administrasi, kata manajemen juga berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata *mantis* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *manager* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, *management* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan (Maskan, 2019).

Sudjana menjelaskan bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam suatu organisasi untuk mengarahkan berbagai sumber daya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kegiatan tersebut melibatkan proses pengaturan,

pengkoordinasian, serta pengendalian aktivitas organisasi yang saling berkaitan (Tim Dosen UPI, 2011). Manajemen dalam pandangan Islam berarti manajemen dapat mengatur segala sesuatu agar apa yang dilakukan dapat mengarah dalam kebaikan. Menurut Ramayulis (Mesiono, 2020) dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam menyatakan bahwa manajemen adalah pengaturan (at-tabdir). Dalam ayat Al- Qur'an terdapat firman Allah swt yang mendefinisikannya, salah satunya yaitu di Q.S. As-Sajadah/2:5 yang artinya Artinya: "Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitungan".

Menurut Terry dalam bukunya "*Principles of Management*", bahwa manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Yaya, 2018). Sedangkan menurut Hasibuan (2013), manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien.

Adapun fungsi manajemen menurut para ahli diantaranya menurut Terry dalam bukunya *Principles of management* (Yaya, 2018), membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu:

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini,

penyediaan factor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha- usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan- perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).

Sedangkan menurut Maskan (2019) Secara sederhana, manajemen merupakan suatu proses tindakan atau seni **perencanaan (*planning*)**, **mengatur (*organizing*)**, **pengarahan (*directing/actuating*)**, dan **pengawasan (*controlling*)** yang dinamis untuk menggerakkan organisasi mencapai tujuannya. Penjelasan mengenai fungsi-fungsi ini sejalan dengan pandangan manajemen klasik yang banyak dianut sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*Planning*) Fungsi ini adalah langkah awal yang krusial dalam manajemen. Perencanaan melibatkan penentuan tujuan yang ingin dicapai organisasi dalam periode waktu tertentu di masa depan, serta merumuskan langkah-langkah atau strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini mencakup identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, penetapan jadwal, dan penyusunan standar kinerja.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) Setelah tujuan dan rencana ditetapkan, langkah selanjutnya adalah pengorganisasian. Fungsi ini berfokus pada pengelompokan dan penentuan berbagai kegiatan penting yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. Ini juga mencakup pemberian

kekuasaan atau wewenang kepada individu atau tim untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, serta penentuan struktur organisasi untuk memastikan koordinasi yang efektif.

- c. Pelaksanaan/Pengarahan (*Actuating/Directing*) Fungsi pelaksanaan atau pengarahan berkaitan dengan bagaimana manajer menggerakkan dan memotivasi karyawan untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Ini melibatkan aspek kepemimpinan, komunikasi, dan pembentukan tim. Manajer bertugas untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta terdorong untuk mencapai tujuan.
- d. Pengawasan (*Controlling*). Pengawasan adalah fungsi manajemen untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengukuran kinerja aktual, membandingkan hasilnya dengan standar yang telah ditetapkan, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Pengawasan berfungsi sebagai mekanisme umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang fungsi manajemen di atas, dapat dipahami bahwa semua manajemen diawali dengan perencanaan (*Planning*), lalu pengorganisasian (*Organizing*), selanjutnya menerapkan fungsi pengarahan yang diartikan dalam kata yang berbeda seperti *actuating dan leading*. Lalu fungsi terakhir selanjutnya dalam manajemen adalah pengendalian (*controlling*)

2. Teori Manajemen Praktik Kerja Lapangan

Manajemen PKL berfungsi sebagai kerangka kerja utama untuk memastikan efektivitas implementasi kegiatan PKL melalui empat fungsi manajemen: Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, serta Pengawasan dan Evaluasi yang ditambahkan dengan kendala dan solusi.

a. Perencanaan Manajemen PKL

Perencanaan merupakan fungsi awal dalam manajemen yang menentukan arah dan keberhasilan suatu program. Dalam teori

manajemen klasik, perencanaan diposisikan sebagai landasan bagi fungsi pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Terry, 2014; Fayol, 1949). Dalam konteks pelaksanaan PKL di SMK Negeri 1 Cugenang dan SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur, perencanaan diarahkan pada terciptanya keselarasan antara kurikulum sekolah dan kebutuhan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) melalui pendekatan link and match yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud, 2016). Perencanaan tersebut disusun secara sistematis dengan memperhatikan unsur 5W1H agar program berjalan efektif, terukur, dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

1) Analisis Kebutuhan Industri

Analisis kebutuhan industri merupakan proses identifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dikembangkan di sekolah dengan tuntutan kompetensi di dunia kerja. Pendekatan ini dikenal sebagai gap analysis yang bertujuan memastikan mutu perencanaan berbasis kebutuhan nyata (Gaspersz, 2012). Secara konseptual, analisis ini sejalan dengan teori pendidikan berbasis kebutuhan pasar kerja (demand-driven education) yang menekankan bahwa pendidikan vokasi harus responsif terhadap dinamika industri agar lulusan memiliki daya saing tinggi (Prosser & Quigley, 1950). Dengan demikian, tahap analisis kebutuhan menjadi fondasi dalam menyusun program PKL yang adaptif dan kontekstual.

2) Penentuan Mitra Industri

Penentuan mitra industri dilakukan secara selektif berdasarkan kesesuaian kompetensi keahlian, kapasitas pembimbingan, legalitas usaha, serta komitmen kerja sama. Kemitraan yang terstruktur antara sekolah dan industri akan meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis pengalaman

(experiential learning) (Epstein, 2011). Kerja sama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam membangun sinergi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan kerja nyata.

3) Penyusunan Program PKL

Penyusunan program PKL mencakup perumusan tujuan, penentuan durasi pelaksanaan, standar kompetensi, indikator keberhasilan, serta sistem evaluasi. Perencanaan yang efektif sebaiknya dimulai dari perumusan capaian akhir yang diharapkan, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip backward design (Wiggins & McTighe, 2005). Melalui pendekatan ini, seluruh aktivitas PKL dirancang untuk memastikan ketercapaian kompetensi secara terstruktur dan terukur.

4) Persiapan Administrasi PKL

Administrasi PKL meliputi penyusunan nota kesepahaman (MoU), surat tugas, jurnal kegiatan, serta instrumen monitoring dan evaluasi. Pengelolaan administrasi yang tertib mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen pendidikan (Mulyasa, 2013). Dengan tata kelola yang baik, pelaksanaan PKL memiliki legitimasi formal sekaligus memudahkan proses pengawasan dan pelaporan.

5) Pembekalan Siswa Sebelum PKL

Pembekalan siswa dilakukan untuk mempersiapkan kesiapan mental, teknis, serta etika kerja sebelum memasuki lingkungan industri. Kesiapan kerja (work readiness) mencakup integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dibutuhkan di dunia kerja (Yorke, 2006). Oleh karena itu, pembekalan menjadi tahapan strategis dalam membangun profesionalisme dan adaptabilitas siswa selama pelaksanaan PKL.

6) Penempatan Siswa

Penempatan siswa dilakukan berdasarkan prinsip kesesuaian kompetensi agar tercipta efektivitas pembelajaran

kontekstual. Pembelajaran yang dikaitkan langsung dengan situasi nyata akan meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa secara signifikan (Johnson, 2002). Penempatan yang tepat juga mendukung optimalisasi pengalaman belajar di lingkungan kerja yang autentik.

7) Koordinasi dengan DU/DI

Koordinasi yang berkelanjutan antara sekolah dan DU/DI menjadi faktor kunci keberhasilan program PKL. Komunikasi dua arah diperlukan untuk menyamakan persepsi terkait target kompetensi, mekanisme pembimbingan, serta sistem evaluasi. Dalam perspektif komunikasi organisasi, efektivitas komunikasi akan meningkatkan sinergi dan meminimalkan potensi kesalahpahaman dalam pelaksanaan program (Robbins & Judge, 2017). Dengan koordinasi yang baik, implementasi PKL dapat berjalan lebih terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan.

b. Pengorganisasian Manajemen PKL

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang berorientasi pada pembagian kerja, pengelompokan aktivitas, serta pengaturan sumber daya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam perspektif manajemen klasik, pengorganisasian dipahami sebagai proses sistematis untuk menyusun struktur kerja dan hubungan koordinatif antarbagian (Terry, 2014). Dalam konteks pelaksanaan PKL di SMK Negeri 1 Cugenang dan SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur, fungsi pengorganisasian menjadi instrumen strategis untuk memastikan seluruh sumber daya manusia dan administratif terkoordinasi secara optimal dalam mendukung ketercapaian kompetensi peserta didik.

1) Struktur Tim Kerja atau Pokja PKL

Struktur tim kerja atau kelompok kerja (Pokja) PKL dibentuk untuk menetapkan alur koordinasi, garis komando, serta

kewenangan masing-masing unsur yang terlibat dalam pelaksanaan program. Struktur organisasi yang jelas akan memperkuat efektivitas komunikasi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan (Fayol, 1949). Dengan adanya pembagian hierarki dan tanggung jawab yang terdefinisi, proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih cepat dan terarah, sehingga meminimalkan potensi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan PKL.

2) Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Pembagian tugas dalam manajemen PKL dilakukan berdasarkan kompetensi, fungsi, dan kapasitas masing-masing personel. Prinsip spesialisasi kerja menekankan bahwa pembagian tugas yang tepat akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi (Robbins & Coulter, 2018). Dalam implementasinya, kepala sekolah, ketua program keahlian, guru pembimbing, serta staf administrasi memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi. Kejelasan deskripsi tugas ini menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

3) Pembagian Tugas Guru dan Instruktur DU/DI

Dalam pelaksanaan PKL, guru pembimbing dari sekolah berperan dalam melakukan monitoring akademik, evaluasi capaian kompetensi, serta pembinaan sikap profesional siswa. Sementara itu, instruktur dari Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) bertanggung jawab terhadap pembimbingan teknis dan penguatan keterampilan praktis di tempat kerja. Kolaborasi ini mencerminkan penerapan model dual system education, yaitu sistem pendidikan yang mengintegrasikan pembelajaran di sekolah dan pelatihan di industri secara simultan (Euler, 2013). Model tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan relevansi kompetensi lulusan terhadap kebutuhan dunia kerja.

4) Mekanisme Penempatan Sesuai Kompetensi

Penempatan peserta didik pada lokasi PKL dilakukan berdasarkan kesesuaian jurusan dan kompetensi keahlian yang dimiliki. Pendekatan ini sejalan dengan konsep competency-based training (CBT), yang menekankan bahwa proses pelatihan harus berorientasi pada pencapaian unit-unit kompetensi tertentu secara terukur. Dengan mekanisme penempatan yang berbasis kompetensi, keterkaitan antara teori yang diperoleh di sekolah dan praktik di industri dapat terintegrasi secara optimal, sehingga memperkuat pembelajaran kontekstual serta meningkatkan kesiapan kerja lulusan.

c. Pelaksanaan Manajemen PKL

Pelaksanaan merupakan tahapan konkret dari manajemen PKL yang mengimplementasikan perencanaan melalui pembelajaran berbasis kerja (work-based learning). Pada fase ini, siswa mengalami proses transfer pembelajaran dari sekolah ke dunia kerja secara langsung sehingga kompetensi profesionalnya dapat teruji dan terinternalisasi sesuai tuntutan industri.

1) Penerapan Budaya Kerja Industri

Penerapan budaya kerja industri meliputi aspek kedisiplinan, produktivitas, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kemampuan berkolaborasi antaranggota tim kerja. Budaya organisasi dipahami sebagai pola nilai dan praktik kerja yang secara langsung memengaruhi perilaku serta kinerja individu di lingkungan kerja nyata (Schein, 2017). Dengan demikian, adaptasi terhadap budaya kerja industri menjadi bagian penting dalam menyiapkan siswa untuk memenuhi standar profesional di dunia usaha.

2) Kegiatan Harian Siswa di Industri

Kegiatan harian siswa dirancang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di masing-masing mitra industri, agar setiap aktivitas kerja memiliki keterkaitan erat

dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di sekolah. Dalam kerangka *experiential learning*, pembelajaran yang berasal dari pengalaman nyata memperkuat pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis peserta didik (Kolb, 2015). Oleh karena itu, keterlibatan aktif dalam tugas harian industri menjadi wahana penting untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari secara terintegrasi.

3) Pembimbingan oleh DU/DI dan Sekolah

Pembimbingan pada pelaksanaan PKL dilakukan secara kolaboratif antara guru pembimbing dari sekolah dan instruktur yang ditugaskan oleh DU/DI melalui supervisi, konsultasi teknis, serta refleksi berkala atas capaian kompetensi siswa. Dalam perspektif perkembangan kognitif dan sosial, proses belajar efektif memerlukan *scaffolding* atau dukungan dari pihak yang lebih berpengalaman untuk membantu siswa mencapai tingkat kompetensi yang lebih tinggi (Vygotsky, 1978; direvisi dalam konteks pendidikan kontemporer 2020). Pendekatan ini menjamin bahwa siswa tidak hanya menerima pengalaman kerja, tetapi juga bimbingan reflektif yang intensif dalam proses pembelajaran.

4) Penggunaan Teknologi Industri

Penggunaan teknologi industri yang aktual menjadi salah satu penentu relevansi kompetensi siswa dengan kebutuhan profesional saat ini. Keterlibatan siswa dalam penggunaan teknologi digital, otomatisasi, dan perangkat lunak industri modern akan meningkatkan literasi teknologi mereka serta keterampilan adaptif. Dalam era transformasi industri 4.0 dan 5.0, penguasaan teknologi menjadi komponen penting dalam profil lulusan yang kompeten (Schwab, 2016; Schwab & Zahidi, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa *exposure* teknologi nyata selama PKL memperkuat daya saing lulusan di pasar kerja profesional.

5) Penguatan Soft Skill

Selain kompetensi teknis, pelaksanaan PKL juga berfokus pada penguatan keterampilan nonteknis (soft skills) seperti komunikasi interpersonal, kerja tim, fleksibilitas, serta kemampuan menyelesaikan masalah dalam konteks profesional. Soft skill merupakan faktor utama yang memengaruhi employability atau keterterimaan lulusan di dunia kerja (Robles, 2012; diperbarui oleh Brown, 2021). Integrasi penguatan soft skill dalam aktivitas harian kerja menjadikan siswa lebih siap menghadapi dinamika hubungan profesional dan tuntutan organisasi.

6) Kedisiplinan dan Etos Kerja

Kedisiplinan dan etos kerja yang kuat mencerminkan motivasi intrinsik serta komitmen profesional peserta didik terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Sikap kerja yang berorientasi pada tanggung jawab, ketepatan waktu, dan tata nilai kerja profesional menjadi modal penting dalam memasuki lingkungan kerja yang kompetitif (Sinamo, 2018). Etos kerja yang tertanam sejak masa PKL akan memberikan bekal perilaku profesional yang konsisten di kemudian hari.

7) Laporan Harian/Jurnal

Penyusunan laporan harian atau jurnal kegiatan siswa berfungsi sebagai alat refleksi pembelajaran sekaligus instrumen monitoring capaian kompetensi yang terukur dan terdokumentasi. Dengan pencatatan aktivitas yang sistematis, guru pembimbing dan instruktur industri dapat mengevaluasi perkembangan keterampilan, sikap kerja, serta pencapaian kompetensi secara berkala. Jurnal juga mendukung refleksi metakognitif siswa untuk memperkuat proses pembelajaran berkelanjutan selama dan setelah pelaksanaan PKL.

d. Evaluasi Manajemen PKL

Evaluasi dalam manajemen PKL merupakan proses

sistematis untuk menilai efektivitas pelaksanaan program serta tingkat ketercapaian tujuan yang telah dirumuskan. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran hasil, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan berkelanjutan. Model evaluasi pendidikan modern menekankan pentingnya evaluasi berbasis konteks, proses, dan hasil sebagai bagian dari siklus peningkatan mutu (Stufflebeam & Zhang, 2017). Dengan demikian, evaluasi PKL menjadi instrumen strategis dalam menjamin relevansi dan kualitas pendidikan vokasi.

1) Evaluasi oleh DU/DI

Evaluasi oleh Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) difokuskan pada penilaian kompetensi teknis dan sikap kerja siswa berdasarkan standar operasional dan budaya kerja yang berlaku di industri. Penilaian ini mencerminkan performa aktual siswa dalam konteks kerja nyata sehingga lebih objektif dan kontekstual. Pendekatan evaluasi berbasis kinerja (*performance-based assessment*) menekankan bahwa kompetensi harus diukur melalui demonstrasi kemampuan dalam situasi autentik (Darling-Hammond & Hyler, 2020). Oleh karena itu, penilaian dari DU/DI menjadi indikator utama kesiapan kerja peserta didik.

2) Evaluasi oleh Sekolah

Evaluasi oleh sekolah bertujuan untuk menilai kesesuaian capaian siswa selama PKL dengan kurikulum serta standar kompetensi yang telah ditetapkan. Sekolah melakukan sinkronisasi antara laporan industri dan indikator pembelajaran agar terdapat kesinambungan antara pengalaman praktik dan capaian akademik. Evaluasi berbasis kurikulum ini penting untuk memastikan bahwa implementasi pembelajaran di industri tetap berada dalam koridor tujuan pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2018). Dengan demikian, sekolah

berperan menjaga integritas akademik program PKL.

3) Instrumen Evaluasi PKL

Instrumen evaluasi PKL harus memenuhi prinsip validitas, reliabilitas, dan objektivitas agar hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Instrumen yang baik mampu mengukur aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara komprehensif (Arikunto, 2018). Selain itu, pengembangan instrumen evaluasi berbasis kompetensi perlu disesuaikan dengan indikator capaian pembelajaran agar proses penilaian berlangsung transparan dan terstandar.

4) Penilaian Produk/Output

Penilaian berbasis produk atau hasil kerja siswa selama PKL mencerminkan pendekatan *authentic assessment*, yaitu penilaian yang menilai kemampuan peserta didik melalui tugas nyata yang relevan dengan dunia kerja. Penilaian autentik memberikan gambaran komprehensif mengenai kompetensi siswa dalam menghasilkan output yang sesuai standar industri (Mueller, 2018). Dengan pendekatan ini, kualitas hasil kerja siswa menjadi indikator konkret keberhasilan pembelajaran berbasis kerja.

5) Umpan Balik DU/DI

Umpan balik dari DU/DI memiliki fungsi strategis sebagai dasar perbaikan kurikulum dan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Masukan dari industri memungkinkan sekolah melakukan penyesuaian materi, metode, maupun standar kompetensi agar lebih selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Konsep *continuous improvement* dalam manajemen mutu pendidikan menekankan bahwa evaluasi harus menghasilkan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan (Fullan, 2020). Oleh sebab itu, umpan balik industri menjadi komponen penting dalam penguatan sistem *link and match*.

6) Presentasi Laporan PKL

Presentasi laporan PKL merupakan bentuk pertanggungjawaban akademik atas pengalaman belajar siswa selama praktik di industri. Kegiatan ini melatih kemampuan komunikasi ilmiah, berpikir reflektif, serta penyusunan argumen berbasis pengalaman empiris. Penguatan komunikasi akademik merupakan bagian penting dalam pembelajaran abad ke-21 yang menekankan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan menyampaikan gagasan secara sistematis (Trilling & Fadel, 2018). Dengan demikian, presentasi laporan tidak hanya menjadi tahap akhir evaluasi, tetapi juga wahana pengembangan kompetensi profesional siswa secara menyeluruh.

e. Kendala Manajemen Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Dalam implementasi manajemen PKL, berbagai kendala dapat muncul baik dari faktor internal maupun eksternal organisasi. Identifikasi hambatan secara sistematis menjadi bagian penting dalam proses pengendalian mutu program. Dalam perspektif manajemen risiko modern, setiap program pendidikan perlu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengantisipasi potensi risiko agar dampaknya dapat diminimalkan secara terencana (Hillson, 2021). Dengan demikian, pemetaan kendala dalam PKL bukan sekadar inventarisasi masalah, melainkan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas program.

1) Keterbatasan Mitra Industri

Salah satu kendala utama dalam manajemen PKL adalah terbatasnya jumlah mitra industri yang relevan dengan kompetensi keahlian siswa. Ketidakseimbangan antara jumlah peserta didik dan kapasitas industri dapat memengaruhi kualitas penempatan serta intensitas pembimbingan. Dalam konteks pendidikan vokasi berbasis kemitraan, kolaborasi yang

kuat antara sekolah dan industri merupakan faktor kunci keberhasilan program (OECD, 2021). Oleh karena itu, keterbatasan mitra dapat berdampak pada menurunnya efektivitas implementasi link and match.

2) Kesiapan Siswa yang Beragam

Perbedaan tingkat kesiapan akademik, keterampilan teknis, maupun kematangan sikap profesional siswa menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan PKL. Kesiapan kerja (work readiness) dipengaruhi oleh integrasi pengetahuan, keterampilan, dan disposisi profesional (Jackson, 2019). Variasi kesiapan ini dapat memengaruhi adaptasi siswa terhadap budaya kerja industri serta capaian kompetensi selama praktik berlangsung.

3) Hambatan Transportasi

Faktor geografis dan keterbatasan akses transportasi juga menjadi kendala eksternal dalam pelaksanaan PKL, khususnya bagi siswa yang ditempatkan di lokasi industri yang relatif jauh dari tempat tinggal atau sekolah. Hambatan mobilitas dapat berdampak pada kedisiplinan, efisiensi waktu, serta kondisi fisik siswa. Dalam kajian manajemen operasional pendidikan, aspek aksesibilitas merupakan salah satu variabel penting dalam menjamin kelancaran implementasi program (UNESCO, 2022).

4) Keterbatasan Sarana

Keterbatasan sarana pendukung, baik di sekolah maupun di lokasi industri, dapat memengaruhi optimalisasi proses pembelajaran berbasis kerja. Sarana yang tidak memadai berpotensi menghambat penguasaan kompetensi tertentu, terutama yang berkaitan dengan teknologi dan peralatan khusus. Transformasi industri berbasis digital menuntut kesiapan infrastruktur yang adaptif terhadap

perkembangan teknologi (Schwab & Zahidi, 2023). Oleh karena itu, keterbatasan fasilitas menjadi tantangan dalam menjaga relevansi kompetensi siswa.

5) Komunikasi yang Kurang Efektif

Komunikasi yang tidak berjalan secara optimal antara sekolah dan DU/DI dapat menimbulkan perbedaan persepsi terkait target kompetensi, mekanisme pembimbingan, maupun sistem evaluasi. Komunikasi organisasi yang efektif menjadi fondasi terciptanya koordinasi dan kolaborasi yang produktif (Robbins & Judge, 2022). Ketidakefektifan komunikasi berpotensi menghambat sinkronisasi program serta menurunkan kualitas pembimbingan siswa.

6) Administrasi yang Belum Optimal

Administrasi yang belum tertata secara sistematis, seperti kelengkapan dokumen kerja sama, laporan kegiatan, dan instrumen evaluasi, dapat menghambat akuntabilitas program PKL. Tata kelola pendidikan modern menekankan pentingnya transparansi dan dokumentasi yang tertib sebagai bagian dari manajemen mutu berbasis bukti (evidence-based management) (Bush, 2020). Administrasi yang belum optimal dapat memengaruhi efektivitas monitoring dan pelaporan hasil program.

Secara keseluruhan, berbagai kendala tersebut perlu diidentifikasi dan dianalisis secara komprehensif sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko. Pendekatan manajemen risiko yang terencana akan membantu lembaga pendidikan dalam mengurangi dampak negatif serta meningkatkan keberhasilan program PKL secara berkelanjutan.

f. Solusi Menghadapi Kendala Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Upaya mengatasi kendala dalam manajemen PKL perlu dilakukan melalui pendekatan sistemik dan kolaboratif yang

melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Strategi penyelesaian masalah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan mutu program secara menyeluruh. Dalam perspektif manajemen mutu pendidikan, perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) menjadi prinsip utama dalam merespons tantangan organisasi secara adaptif (Fullan, 2020). Oleh karena itu, solusi terhadap kendala PKL harus dirancang secara terintegrasi dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

1) Ekspansi Kemitraan Industri

Perluasan jejaring kemitraan industri menjadi langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan daya tampung dan variasi bidang praktik. Kolaborasi multipihak antara sekolah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain terbukti memperkuat ekosistem pendidikan vokasi (OECD, 2021). Ekspansi kemitraan juga mendukung implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi yang menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara lembaga pendidikan dan sektor industri (Kemendikbudristek, 2022).

2) Pembekalan Intensif Berbasis Kebutuhan

Pembekalan siswa sebelum PKL perlu dirancang secara lebih intensif dan berbasis analisis kebutuhan industri agar mampu meningkatkan kesiapan kerja. Program pembekalan yang kontekstual dan adaptif terhadap dinamika pasar kerja akan memperkuat kompetensi teknis maupun nonteknis siswa (Jackson, 2019). Dengan pendekatan berbasis kebutuhan, pembekalan tidak hanya bersifat umum, tetapi diarahkan pada penguatan kompetensi spesifik yang relevan dengan tempat praktik.

3) Dukungan Transportasi atau Sistem Kelompok

Untuk mengatasi hambatan mobilitas, sekolah dapat

menyediakan dukungan transportasi atau menerapkan sistem penempatan berbasis kelompok di lokasi industri tertentu. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kedisiplinan siswa selama pelaksanaan PKL. Dalam kajian aksesibilitas pendidikan, dukungan logistik menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan implementasi program berbasis praktik (UNESCO, 2022).

4) Monitoring Berkala

Monitoring yang dilakukan secara berkala oleh guru pembimbing dan pihak sekolah merupakan bentuk pengendalian mutu terhadap pelaksanaan PKL. Supervisi yang terstruktur memungkinkan identifikasi permasalahan secara dini dan pemberian solusi yang tepat waktu. Manajemen berbasis evaluasi berkelanjutan menekankan pentingnya pengawasan sistematis untuk menjaga efektivitas program (Bush, 2020). Monitoring juga memperkuat komunikasi antara sekolah dan DU/DI.

5) Revitalisasi Peralatan

Revitalisasi peralatan praktik di sekolah menjadi solusi penting untuk menjaga kesesuaian antara pembelajaran di sekolah dan teknologi yang digunakan di industri. Transformasi industri yang semakin terdigitalisasi menuntut kesiapan infrastruktur pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi (Schwab & Zahidi, 2023). Dengan pembaruan fasilitas dan peralatan, siswa akan lebih siap menghadapi tuntutan kerja yang berbasis teknologi mutakhir.

6) Digitalisasi Administrasi

Digitalisasi administrasi PKL, seperti penggunaan sistem informasi berbasis daring untuk pencatatan jurnal, monitoring, dan evaluasi, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan program. Implementasi tata kelola

digital dalam pendidikan mendukung akuntabilitas serta kemudahan akses data secara real-time (OECD, 2021). Administrasi berbasis digital juga mempermudah koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKL.

7) Pelibatan Orang Tua sebagai Mitra Pendidikan

Pelibatan orang tua sebagai mitra pendidikan merupakan strategi pendukung dalam meningkatkan kedisiplinan, motivasi, dan tanggung jawab siswa selama PKL. Kemitraan sekolah dan keluarga terbukti memperkuat keberhasilan program pendidikan melalui dukungan moral dan pengawasan eksternal (Epstein, 2019). Dengan keterlibatan orang tua, proses pembinaan karakter dan etos kerja siswa dapat berlangsung lebih konsisten baik di lingkungan sekolah maupun di rumah.

Secara keseluruhan, solusi terhadap kendala PKL harus dipahami sebagai bagian dari strategi manajemen terpadu yang berorientasi pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan vokasi. Pendekatan kolaboratif, adaptif, dan berbasis data akan memperkuat efektivitas program PKL dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja.

3. Konsep Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL), yang dalam berbagai literatur juga dikenal sebagai magang (internship), merupakan bentuk pembelajaran berbasis kerja (work-based learning) yang dirancang untuk membentuk dan memperkuat kompetensi peserta didik secara komprehensif. PKL mengintegrasikan proses pembelajaran di sekolah dengan pengalaman kerja langsung di dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) secara sistematis dan sinkron guna mencapai standar kompetensi profesional sesuai bidang keahlian masing-masing. Konsep ini sejalan dengan teori *experiential learning* yang menegaskan bahwa pembelajaran akan lebih bermakna ketika peserta didik terlibat langsung dalam pengalaman nyata di

lingkungan kerja (Kolb, 2015). Dengan demikian, PKL bukan sekadar kegiatan praktik, melainkan strategi pendidikan yang terstruktur untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Secara konseptual, pendidikan kejuruan memiliki orientasi kuat terhadap kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia yang siap pakai. Said (2019) menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan merupakan sistem pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu bekerja dalam bidang pekerjaan tertentu secara profesional. Hal ini dipertegas dalam kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang menekankan pentingnya penguatan kemitraan dengan DUDI dalam rangka mewujudkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri (Kemendikbudristek, 2021). Dengan demikian, PKL menjadi instrumen strategis dalam mengimplementasikan prinsip *link and match* antara sekolah dan dunia kerja.

Menurut Haryanti (2022), PKL merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang dilaksanakan melalui keterlibatan langsung siswa di DU/DI secara terencana, terarah, dan sistematis untuk mencapai tingkat keahlian profesional. PKL merupakan bagian integral dari Pendidikan Sistem Ganda (PSG), yang sebelumnya dikenal dengan istilah Praktik Kerja Industri (Prakerin). Secara historis, kebijakan ini mulai diterapkan dalam kurikulum SMK tahun 1994, diperkuat pada edisi 1999 dan 2005, hingga dalam implementasi Kurikulum 2013 revisi yang menetapkan masa pelaksanaan PKL menjadi lebih panjang, yaitu sekitar 6–10 bulan. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memperluas pengalaman belajar autentik bagi peserta didik melalui kolaborasi aktif antara sekolah dan institusi pasangan (DUDI).

Pelaksanaan PKL bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata, menanamkan budaya dan etos kerja, serta membekali siswa dengan

kompetensi teknis dan nonteknis yang dibutuhkan di pasar kerja global. Berdasarkan pedoman dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2021), tujuan PKL meliputi: (1) memberikan pengalaman kerja langsung yang berorientasi pada mutu dan kualitas hasil; (2) menanamkan etos kerja dan profesionalisme; (3) melengkapi kompetensi yang belum terpenuhi di sekolah agar sesuai dengan standar kompetensi lulusan; serta (4) mengaktualisasikan model PSG melalui sinergi program pendidikan sekolah dan pelatihan industri. Tujuan tersebut menegaskan bahwa PKL tidak hanya berfungsi sebagai wahana praktik, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai kerja dan budaya industri.

Manfaat PKL juga dapat ditinjau dari aspek pengembangan individu maupun kelembagaan. Hamalik (dalam Haryanti, 2022) menyebutkan bahwa PKL berkontribusi dalam menumbuhkan sikap kerja positif, memperluas wawasan dan kompetensi yang tidak diperoleh di sekolah, meningkatkan motivasi dan etos kerja siswa, serta mempererat hubungan kerja sama antara sekolah dan DU/DI. Selain itu, PKL membuka peluang kolaborasi lebih luas seperti magang guru, bantuan peralatan praktik, serta promosi lulusan kepada dunia industri. Dalam konteks teori *employability skills*, pengalaman kerja langsung berperan penting dalam meningkatkan kesiapan kerja dan daya saing lulusan (Jackson, 2019).

Dari perspektif manajerial, pelaksanaan PKL memerlukan pengelolaan yang sistematis agar tujuan program tercapai secara efektif. Manajemen PKL mencakup beberapa aspek utama, antara lain pemilihan lokasi industri, penempatan siswa sesuai kompetensi, pembekalan awal, pembimbingan selama kegiatan, monitoring dan evaluasi, penilaian hasil, serta tindak lanjut program. Fungsi-fungsi tersebut selaras dengan prinsip manajemen pendidikan yang menekankan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai satu kesatuan siklus manajemen (Bush, 2020). Tanpa manajemen yang efektif, PKL berpotensi kehilangan arah dan tidak optimal dalam menghasilkan kompetensi yang diharapkan.

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan PKL, diperlukan berbagai media administrasi dan pendukung operasional. Media tersebut meliputi dokumen kerja sama (MoU/perjanjian kerja sama), buku panduan PKL, formulir pendaftaran dan penilaian, platform daring atau sistem informasi, surat menyurat resmi, serta media presentasi laporan. Digitalisasi administrasi PKL menjadi salah satu inovasi penting dalam tata kelola pendidikan vokasi modern, karena memungkinkan proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel (OECD, 2021).

Selain itu, metode pelaksanaan PKL harus dirancang secara efektif dan kolaboratif. Metode tersebut mencakup: (1) sosialisasi dan penyampaian informasi yang komprehensif kepada siswa, orang tua, dan perusahaan; (2) koordinasi dan komunikasi intensif antara sekolah dan DUDI; (3) pelatihan dan pembekalan pra-PKL; (4) pendampingan dan bimbingan selama pelaksanaan; (5) supervisi dan monitoring berkala; serta (6) evaluasi dan penilaian capaian kompetensi siswa. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *continuous improvement* dalam manajemen pendidikan yang menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan berbasis evaluasi (Fullan, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PKL merupakan model pembelajaran vokasi yang bersifat integratif, kolaboratif, dan berorientasi pada pembentukan kompetensi profesional. PKL tidak hanya menjadi wahana praktik kerja, tetapi juga instrumen strategis dalam meningkatkan relevansi, kualitas, dan daya saing lulusan pendidikan kejuruan di era transformasi industri.

4. Peningkatan Kompetensi Siswa

Peningkatan kompetensi siswa tidak bisa dipandang secara pragmatis, terpisah dari bagian yang seutuhnya. Peningkatan kompetensi siswa harus dilihat secara menyeluruh sehingga laju perkembangan kompetensi siswa dapat sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Finch dan Crunkilton dalam Sutianah (2021) mendefinisikan bahwa:

“Kompetensi sebagai penguasaan terhadap tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal ini diartikan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang harus dimiliki peserta didik agar dapat melaksanakan tugas yang dipelajarinya di sekolah sesuai kemampuan yang diperlukan di dunia kerja.”

Industri 4.0 bertujuan memperkuat dan memperluas daya saing untuk keperluan jangka Panjang dunia kerja dengan meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi produksi melalui komunikasi, informasi dan intelijen (M. Gabriel & E. Pessl, 2016) dalam Fadhila, 2025. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kipper et al (2021) terkait kompetensi yang dibutuhkan oleh industri 4.0 berdasarkan kelompok keterampilan, pendidikan teknik, dan kinerja manusia, maka disusun peta konseptual, yaitu diagram hierarki dan dimensi yang menunjukkan struktur pengetahuan dalam konteks tertentu. Peta konsep kompetensi dan pengetahuan tersebut untuk menyoroti arus utama transformasi yang disebabkan oleh penerapan teknologi.

Tujuan utama pembelajaran di sekolah adalah menciptakan dan mentransfer pengetahuan sehingga peserta didik mengalami perubahan perilaku yang mencerminkan kompetensi baru. Hal ini penting untuk menyeimbangkan kebutuhan Industri 4.0 dengan persiapan lulusan yang kompeten di bidangnya. Kompetensi yang dimaksud yakni meliputi pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, sikap dan minat. Dalam konsep pelatihan berbasis kompetensi dijelaskan bahwa kompetensi merupakan gabungan antara keterampilan, pengetahuan dan sikap. Kompetensi digunakan untuk melakukan penilaian terhadap standar, memberikan indikasi yang jelas tentang keberhasilan dalam kegiatan pengembangan, membentuk system pengembangan dan dapat digunakan untuk Menyusun uraian tugas individu.

Berdasarkan Permendikbud Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MA bahwa standar kompetensi siswa SMK dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yakni memiliki pemahaman, penghayatan dan kesadaran dalam mengamalkan ajaran agama, akhlak mulia dan kesadaran hidup berdasarkan nilai kasih sayang; 2) Kebangsaan dan cinta tanah air dimana meyakini pancasila sebagai dasar Negara, memiliki kesadaran sejarah dan rasa cinta serta semangat untuk tanah air, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga Negara, bekerja sama antar ragam suku, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk patuh terhadap hukum norma sosial; 3) Karakter pribadi dan sosial dimana memiliki kebiasaan untuk berperilaku jujur, memiliki tanggungjawab dalam menyelesaikan tugas, memiliki kemampuan interaksi, mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, memiliki rasa ingin tahu, memiliki etos kerja yang baik; 4) Kesehatan jasmani dan rohani yakni memiliki pemahaman dan kesadaran berperilaku hidup bersih, memiliki kebugaran jasmani dan rohani, menyadari potensi dirinya tangguh dan produktif; 5) Literasi yakni memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, mampu berkomunikasi bahasa asing sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas sesuai keahlian, memiliki pemahaman matematika sesuai tugas keahliannya, memiliki kemampuan sains sesuai bidang keahliannya, mempunyai keahlian teknologi, memiliki kemampuan mengekspresikan dan menciptakan karya; 6) Kreatifitas yakni memiliki kemampuan mencari dan menghasilkan cara kerja dan menghasilkan produk sesuai dengan keahliannya, memiliki kemampuan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan keahliannya secara kreatif; 7) Estetika yakni memiliki kemampuan mengkritiki dan apresiasi dan menerapkan aspek estetika dalam menciptakan layanan/produk sesuai keahlian; 8) Kemampuan teknis yakni memiliki kemampuan dasar dalam bidang tertentu sesuai kebutuhan dunia kerja, memiliki kemampuan spesifik pada program keahlian, memiliki pengalaman dalam menerapkan program keahlian, memiliki kemampuan

menjalankan tugas keahlian dengan menerapkan prinsip keselamatan, kesehatan dan keamanan lingkungan; dan 9) Kewirausahaan yakni memiliki kemampuan mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang usaha dengan memberdayakan pengetahuan dan ketrampilan, mampu memperhitungkan dan mengambil resiko dalam mengelola usaha, memiliki keinginan mengelola usaha.

Sedangkan Wardina, et al (2019) menjelaskan bahwa:

“Terdapat dua kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusan Pendidikan vokasi untuk menghadapi era revolusi industry 4.0, yaitu *soft skill* dan *hard skill*. Kompetensi ini sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini agar lulusan vokasi mampu bersaing di dunia kerja / dunia industri.”

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dimaknai bahwa keseimbangan antara *hard skill* dan *soft skill* merupakan indikator penting dalam menentukan kesiapan kerja lulusan vokasi. Penguasaan teknis tanpa didukung karakter profesional dan kecakapan sosial akan mengurangi daya saing individu di lingkungan industri yang dinamis. Sebaliknya, *soft skill* yang baik tanpa kompetensi teknis yang memadai juga tidak cukup untuk memenuhi standar kualifikasi kerja. Oleh karena itu, integrasi kedua kompetensi tersebut perlu diwujudkan secara sistematis melalui proses pembelajaran, khususnya melalui kegiatan PKL yang memberikan pengalaman autentik di dunia usaha dan dunia industri. Dengan demikian, lulusan pendidikan vokasi diharapkan tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga matang secara sikap dan profesionalisme.

B. Landasan Enam Sistem Nilai

Landasan sistem nilai dalam manajemen pendidikan memiliki peran strategis sebagai fondasi normatif yang mengarahkan perilaku, kebijakan, serta budaya organisasi sekolah. Nilai tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai kerangka konseptual yang membentuk pola interaksi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan dalam lingkungan pendidikan. Dalam

konteks pendidikan vokasi, penguatan sistem nilai menjadi semakin penting karena proses pembelajaran tidak hanya bertujuan menghasilkan kompetensi teknis, tetapi juga membentuk karakter dan profesionalisme peserta didik. Sejalan dengan pandangan Bush (2020), efektivitas manajemen pendidikan sangat dipengaruhi oleh kejelasan nilai yang dianut dan diinternalisasikan dalam praktik kelembagaan.

Salah satu kerangka nilai yang relevan dalam pengembangan budaya organisasi pendidikan adalah Enam Sistem Nilai (Six Values System) yang diperkenalkan oleh Sanusi (2009). Kerangka ini menekankan pentingnya integrasi nilai sebagai dasar dalam membangun kolaborasi, memperkuat interaksi profesional, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dan produktif. Enam sistem nilai tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek moral, tetapi juga mencakup dimensi filosofis dan operasional yang mendukung terciptanya tata kelola pendidikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Enam Sistem Nilai menjadi landasan konseptual dalam menganalisis dan mengimplementasikan manajemen Praktik Kerja Lapangan (PKL) secara lebih komprehensif. Penjelasan Enam Sistem Nilai tersebut sebagai berikut:

1. Nilai Teologis

Nilai teologis dalam konsep Enam Sistem Nilai yang dikemukakan oleh Sanusi (2009) menempatkan aspek spiritual dan moral sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan serta pengelolaan organisasi. Secara konseptual, nilai ini berkaitan dengan teori pendidikan karakter yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan moral, integritas, dan tanggung jawab peserta didik (Lickona, 2018). Dengan demikian, pendidikan dipahami sebagai proses yang membangun kesadaran etis individu agar mampu bertindak secara benar dalam kehidupan sosial maupun profesional. Dalam kerangka *values-based management*, pengintegrasian nilai moral dalam sistem pengelolaan lembaga pendidikan akan memperkuat budaya kerja yang berintegritas dan

berorientasi pada kepentingan bersama (Bush, 2020).

Dalam konteks pendidikan vokasi, khususnya pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), nilai teologis memiliki peran penting sebagai landasan etik dalam membentuk perilaku siswa di dunia usaha dan dunia industri (DU/DI). Internalisasi nilai ini mendorong siswa untuk memandang pekerjaan sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah yang harus dijalankan secara profesional, bukan semata-mata sebagai aktivitas untuk memperoleh keuntungan material. Hal tersebut sejalan dengan kerangka kompetensi abad ke-21 yang menekankan pentingnya integrasi karakter dan etika dalam kesiapan kerja lulusan (OECD, 2021). Oleh karena itu, penerapan nilai teologis dalam manajemen PKL tidak hanya mendukung penguatan kompetensi teknis (*hard skills*), tetapi juga mengembangkan kompetensi nonteknis (*soft skills*) seperti kejujuran, kedisiplinan, komitmen, dan etos kerja. Dengan integrasi tersebut, lulusan SMK diharapkan mampu menjadi tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat dalam menghadapi tuntutan dunia industri.

2. Nilai Etis-Hukum

Nilai etis-hukum dalam kerangka Enam Sistem Nilai menurut Sanusi (2009) menempatkan norma, aturan, dan prinsip moral sebagai fondasi dalam setiap aktivitas pendidikan dan profesional. Secara teoretis, nilai ini selaras dengan teori etika normatif yang menekankan kewajiban moral dan kepatuhan terhadap aturan sebagai pedoman bertindak (Velasquez et al., 2018), serta prinsip *good governance* yang menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi (Bush, 2020). Dalam konteks pendidikan vokasi, nilai etis-hukum berfungsi sebagai kerangka normatif yang memastikan seluruh proses manajemen, termasuk pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, standar industri, dan kode etik profesional yang berlaku.

Dalam implementasinya di SMK, internalisasi nilai etis-hukum tercermin melalui kepatuhan siswa terhadap standar operasional prosedur

(SOP), penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), disiplin kerja, serta komitmen menjaga kerahasiaan data perusahaan. Penguatan nilai ini tidak hanya membentuk perilaku taat aturan, tetapi juga menumbuhkan integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme sebagai bagian dari kompetensi abad ke-21 (OECD, 2021). Berdasarkan analisis penulis, pengintegrasian nilai etis-hukum secara sistematis dalam kurikulum dan praktik PKL menjadi prasyarat penting untuk membangun kepercayaan antara sekolah dan mitra industri, sekaligus menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran hukum dan etika kerja yang kuat.

3. Nilai Estetis

Nilai estetis dalam kerangka Enam Sistem Nilai menurut Sanusi (2009) menekankan pentingnya penciptaan lingkungan yang tertata, nyaman, dan harmonis sebagai pendukung proses pembelajaran maupun praktik kerja. Secara teoretis, hal ini sejalan dengan kajian *environmental psychology* yang menyatakan bahwa kondisi lingkungan fisik memiliki pengaruh terhadap aspek kognitif, emosional, dan perilaku individu (Steg & de Groot, 2019). Selain itu, dalam perspektif kesejahteraan lingkungan kerja modern, suasana yang bersih, rapi, dan menarik secara visual dapat meningkatkan motivasi serta kreativitas individu (OECD, 2021). Dalam konteks manajemen PKL di SMK, nilai estetis tidak hanya diwujudkan melalui penataan ruang, kebersihan, dan desain tempat kerja, tetapi juga melalui terciptanya interaksi sosial yang positif dan budaya saling menghargai di lingkungan industri.

Berdasarkan analisis penulis, penerapan nilai estetis dalam pelaksanaan PKL memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan semangat kerja dan kualitas hasil belajar siswa. Lingkungan yang kondusif mampu menumbuhkan rasa nyaman dan percaya diri, sehingga siswa terdorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan tugas-tugas praktik. Hal ini selaras dengan teori *Self-Determination* yang menjelaskan bahwa motivasi intrinsik akan berkembang apabila individu

merasa didukung secara lingkungan dan sosial (Ryan & Deci, 2020). Oleh karena itu, penguatan nilai estetis dalam manajemen PKL dapat dipahami sebagai strategi yang tidak hanya memperhatikan aspek keindahan fisik, tetapi juga membangun budaya kerja yang inspiratif, sehingga siswa SMK lebih siap menghadapi tuntutan profesionalisme di dunia industri.

4. Nilai Logis-Rasional

Nilai logis-rasional dalam kerangka Enam Sistem Nilai menurut Sanusi (2009) menekankan pentingnya penggunaan akal sehat, penalaran sistematis, serta pertimbangan objektif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Secara teoretis, nilai ini sejalan dengan konsep *critical thinking* yang menempatkan kemampuan analisis, evaluasi bukti, dan penarikan kesimpulan berbasis data sebagai kompetensi utama abad ke-21 (Facione, 2020; OECD, 2021). Dalam konteks pelaksanaan PKL di SMK, nilai logis-rasional mendorong siswa untuk tidak hanya menjalankan instruksi teknis, tetapi juga memahami alasan di balik setiap prosedur kerja. Siswa dilatih untuk mengidentifikasi permasalahan secara sistematis, menganalisis penyebabnya, serta merumuskan solusi yang rasional berdasarkan standar operasional dan fakta empiris di lapangan.

Berdasarkan analisis penulis, pengintegrasian nilai logis-rasional dalam manajemen PKL dapat dilakukan melalui pemberian tugas berbasis proyek (*project-based learning*) yang menuntut penerapan prinsip sains, teknologi, dan perhitungan teknis dalam situasi nyata. Pendekatan ini sejalan dengan teori *problem-based learning* yang menekankan pembelajaran melalui pemecahan masalah kontekstual untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (Hmelo-Silver, 2022). Dengan pembiasaan berpikir kritis dan analitis, siswa tidak hanya mampu menyelesaikan pekerjaan secara prosedural, tetapi juga dapat mengambil keputusan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penguatan nilai logis-rasional menjadi landasan penting dalam membentuk lulusan SMK yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi dinamika dunia usaha dan industri yang semakin kompleks.

5. Nilai Fisik-Fisiologis

Nilai fisik-fisiologis dalam kerangka Enam Sistem Nilai menurut Sanusi (2009) menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar fisik sebagai prasyarat berlangsungnya proses pembelajaran dan kerja yang optimal. Secara teoretis, konsep ini selaras dengan teori hierarki kebutuhan dari Maslow yang menempatkan kebutuhan fisiologis dan rasa aman sebagai fondasi sebelum individu mencapai aktualisasi diri (revisi dan pengembangan kontemporer dalam Kaufman, 2020). Selain itu, prinsip ergonomi dan keselamatan kerja modern menegaskan bahwa lingkungan kerja yang aman, sehat, dan didukung fasilitas memadai akan meningkatkan performa serta menurunkan risiko kecelakaan (International Labour Organization/ILO, 2022). Dalam konteks PKL di SMK, nilai fisik-fisiologis tercermin melalui ketersediaan sarana praktik yang relevan dengan standar industri, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta dukungan teknologi yang sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan industri.

Berdasarkan analisis penulis, optimalisasi nilai fisik-fisiologis dalam manajemen PKL berpengaruh langsung terhadap efektivitas pembelajaran praktik dan kualitas kinerja siswa. Fasilitas yang layak, peralatan yang sesuai standar, serta lingkungan kerja yang ergonomis membantu siswa menjaga fokus, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan produktivitas. Hal ini juga sejalan dengan konsep *workplace well-being* yang menekankan bahwa kesejahteraan fisik berkontribusi terhadap motivasi dan kinerja individu (OECD, 2021). Dengan demikian, pemenuhan aspek fisik-fisiologis bukan sekadar dukungan teknis, melainkan bagian strategis dalam memastikan siswa SMK memperoleh pengalaman praktik yang aman, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan industri.

6. Nilai Teleologis

Nilai teleologis berorientasi pada tujuan akhir yang ingin dicapai dalam suatu proses pendidikan. Dalam perspektif filsafat pendidikan,

pendekatan teleologis memandang bahwa setiap aktivitas pembelajaran harus diarahkan pada capaian yang bermakna dan berorientasi hasil (Biesta, 2020). Dalam manajemen pendidikan modern, orientasi tujuan juga sejalan dengan teori goal-setting yang menyatakan bahwa kejelasan tujuan akan meningkatkan motivasi, komitmen, dan kinerja individu (Locke & Latham, 2019). Dalam konteks PKL di SMK, nilai teleologis menekankan bahwa seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus diarahkan pada peningkatan kompetensi teknis dan karakter profesional siswa sebagai lulusan yang siap kerja.

Menurut analisis penulis, penerapan nilai teleologis dalam manajemen PKL mendorong guru pembimbing dan instruktur industri untuk menyelaraskan program praktik dengan profil lulusan yang diharapkan. Kejelasan orientasi tujuan membantu memastikan bahwa kemitraan industri, strategi pembimbingan, dan sistem evaluasi difokuskan pada pencapaian kompetensi yang terukur dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan adanya orientasi tujuan yang kuat, proses PKL tidak hanya menjadi kegiatan rutin administratif, tetapi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan daya saing lulusan SMK secara berkelanjutan.

C. Landasan Kebijakan

Landasan kebijakan dalam penelitian ini dipahami sebagai seperangkat regulasi dan ketentuan normatif yang menjadi dasar hukum sekaligus pedoman operasional dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan, khususnya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di SMK. Dalam konteks penelitian yang berjudul “Manajemen PKL untuk Meningkatkan Kompetensi Siswa di SMK”, keberadaan landasan kebijakan memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi acuan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses manajerial PKL. Kebijakan tersebut memastikan bahwa kegiatan PKL tidak hanya bersifat administratif, tetapi selaras dengan tujuan pendidikan nasional, kebutuhan dunia usaha dan dunia

industri (DUDI), serta standar kompetensi lulusan yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, manajemen PKL yang dikaji dalam penelitian ini beroperasi dalam kerangka regulatif yang jelas dan terstruktur.

Berikut ini merupakan landasan kebijakan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan dan manajemen PKL di SMK:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pendidikan kejuruan ditegaskan sebagai pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang tertentu. Ketentuan tersebut memperkuat posisi SMK sebagai lembaga yang berorientasi pada kesiapan kerja lulusan. Oleh karena itu, manajemen PKL sebagai bagian dari pendidikan kejuruan harus dirancang secara sistematis agar mampu mendukung pencapaian kompetensi siswa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan (Perubahan melalui Cipta Kerja). Regulasi ini mengatur aspek ketenagakerjaan, termasuk penguatan kompetensi dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Dalam kaitannya dengan PKL, undang-undang ini menekankan pentingnya kesesuaian kompetensi lulusan dengan standar yang dibutuhkan pasar kerja. Manajemen PKL di SMK perlu memperhatikan standar kompetensi kerja serta relevansi pembelajaran dengan tuntutan industri agar lulusan memiliki daya saing yang tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan ini memberikan kerangka mengenai tata kelola pendidikan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam implementasi PKL, regulasi ini menjadi dasar dalam memastikan bahwa pengelolaan program dilakukan secara terstruktur, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan. Dengan demikian, proses PKL tidak berjalan secara spontan, melainkan melalui mekanisme yang terencana dan terdokumentasi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020.

Permendikbud ini mengatur pelaksanaan pembelajaran berbasis kerja atau praktik di dunia industri sebagai bagian dari kurikulum SMK. Regulasi ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan DUDI. Dalam penelitian ini, kebijakan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis sejauh mana manajemen PKL mampu mengintegrasikan pembelajaran teori di sekolah dengan praktik nyata di industri.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK. Peraturan ini menetapkan standar kompetensi lulusan serta standar proses pembelajaran di SMK. PKL merupakan salah satu strategi untuk mencapai standar kompetensi tersebut. Oleh sebab itu, manajemen PKL harus diarahkan pada pencapaian capaian pembelajaran yang telah ditetapkan secara nasional, sehingga kegiatan PKL benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi siswa.
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Instruksi Presiden ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan daya saing lulusan SMK melalui penguatan kerja sama dengan dunia industri. Kebijakan ini mendorong terciptanya sinergi antara sekolah dan DUDI dalam rangka mewujudkan konsep link and match. Dalam konteks penelitian ini, revitalisasi SMK menjadi landasan strategis dalam mengkaji efektivitas manajemen PKL sebagai upaya peningkatan kompetensi siswa.
7. Panduan PKL SMK. Panduan PKL yang diterbitkan oleh Direktorat SMK berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan PKL, mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi. Dokumen ini menjadi rujukan operasional bagi sekolah dalam menyusun program dan mekanisme pelaksanaan PKL. Dalam penelitian ini, panduan tersebut digunakan sebagai acuan untuk menilai kesesuaian praktik manajemen PKL di lapangan dengan ketentuan yang berlaku.
8. Program PKL SMK. Program PKL yang disusun oleh sekolah merupakan implementasi konkret dari kebijakan nasional yang disesuaikan dengan

karakteristik satuan pendidikan. Program ini memuat perencanaan kegiatan, pembagian tugas pembimbing, jadwal pelaksanaan, serta sistem monitoring dan evaluasi. Kejelasan program menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas manajemen PKL dalam meningkatkan kompetensi siswa.

9. Kurikulum Sekolah. Kurikulum sekolah menjadi dasar akademik dalam pelaksanaan PKL. Kurikulum menentukan capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa, termasuk kompetensi yang diperoleh melalui praktik industri. Manajemen PKL harus memastikan adanya keterpaduan antara kurikulum operasional sekolah dengan kegiatan PKL agar proses pembelajaran berlangsung secara berkesinambungan.
10. Sumber Daya Manusia (Kepala Sekolah dan Guru). Kualitas sumber daya manusia di sekolah, khususnya kepala sekolah dan guru, sangat menentukan keberhasilan manajemen PKL. Kepala sekolah berperan dalam pengambilan kebijakan dan penguatan kemitraan dengan industri, sedangkan guru pembimbing bertanggung jawab dalam pendampingan dan evaluasi siswa selama PKL. Oleh karena itu, kompetensi manajerial dan profesional tenaga pendidik menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan PKL.

Secara keseluruhan, landasan kebijakan tersebut membentuk kerangka normatif yang menjadi pijakan dalam pengelolaan PKL di SMK. Kesesuaian antara regulasi nasional dan implementasi di tingkat sekolah menjadi faktor penentu dalam mewujudkan manajemen PKL yang efektif dan berdampak pada peningkatan kompetensi siswa serta daya serap lulusan di dunia kerja.

D. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan Praktik Kerja Lapangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi siswa pada pendidikan kejuruan. Program PKL yang dikelola secara sistematis mampu memberikan pengalaman kerja nyata kepada peserta didik sehingga kompetensi teknis maupun sikap kerja dapat berkembang

secara optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti (2025) menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program PKL. Pengelolaan program yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah serta adanya pembekalan yang memadai sebelum siswa ditempatkan di industri menjadi faktor penting dalam keberhasilan program tersebut. Penelitian lain yang dilakukan oleh Risa (2022) menemukan bahwa manajemen PKL yang dilaksanakan secara komprehensif memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kompetensi peserta didik. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa koordinasi antara pihak sekolah dan industri menjadi faktor penting dalam memastikan kesesuaian antara kegiatan praktik di lapangan dengan kompetensi yang harus dicapai siswa. Sementara itu, penelitian Mamesah dkk. (2024) menyoroti pentingnya tahap perencanaan dalam pengelolaan PKL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang matang, seperti pembentukan tim pelaksana, pemilihan mitra industri yang sesuai, serta penyusunan administrasi program, menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pelaksanaan PKL di sekolah.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji pengelolaan Praktik Kerja Lapangan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada studi kasus tunggal di satu sekolah atau satu program keahlian tertentu. Selain itu, beberapa penelitian lebih menekankan pada deskripsi pelaksanaan program tanpa melakukan analisis komprehensif terhadap seluruh fungsi manajemen secara terpadu. Terdapat pula catatan penting, seperti temuan Haryani A. & Sunarto (2021) yang menyoroti bahwa meskipun manajemen berjalan baik, aspek Evaluasi dan Pemantauan (*Controlling*) seringkali belum maksimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengkaji manajemen PKL secara lebih komprehensif dengan menganalisis seluruh fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan

studi komparatif pada dua sekolah menengah kejuruan yang berbeda sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai praktik pengelolaan PKL. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi model manajerial PKL yang praktis dan terukur yang selaras dengan kebijakan *Link & Match 8+i* Kurikulum Merdeka. Upaya penegasan orisinalitas penelitian ini, perbandingan dengan penelitian terdahulu yang relevan disajikan dengan fokus *research gap* yang akan diisi oleh penelitian ini:

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu yang relevan

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Temuan Utama	Relevansi	Gaps Penelitian
1	Ismayanti DT (2025)	Program Manajemen PKL dalam Meningkatkan Kompetensi Siswa (Jurusan Manajemen Perkantoran)	Seluruh fungsi POAC dirancang dengan baik, meliputi integrasi kurikulum, pembekalan intensif, dan penggunaan jurnal harian.	Sama-sama meneliti Manajemen PKL (POAC) untuk Peningkatan Kompetensi dengan pendekatan kualitatif.	Studi Kasus Tunggal dan Spesifik Jurusan. penelitian ini menawarkan Studi Komparatif Lintas Organisasi dan Keahlian.
2	Risa A. (2022)	Manajemen Pengelolaan PKL dan Efektivitasnya dalam Meningkatkan Kompetensi Peserta Didik	Manajemen yang komprehensif (POAC) terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi siswa.	Memiliki kesamaan dari judul dan tujuan.	Studi Kasus Tunggal. penelitian ini unggul dalam Studi Komparatif Dua Sekolah (SMK Negeri 1 Cugenang dan SMK Negeri Pertanian

					Pembangunan Cianjur).
3	Mamesah SF dkk. (2024)	Manajemen PKL pada Program Keahlian Teknik Komputer & Jaringan (TKJ)	Tahap perencanaan PKL dinilai cukup baik, termasuk pembentukan panitia, format industri, dan administrasi.	Studi manajemen PKL kualitatif dan fokus pada tahap perencanaan.	Fokus pada satu program keahlian dan satu sekolah. penelitian ini melakukan lintas korelasi program keahlian di dua sekolah.
4	Setiyaningr um, D (2018)	Manajemen Praktik Kerja Lapangan di SMK Batik 2 Surakarta	Mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Jenis penelitian kualitatif etnografi.	Fokus pada deskripsi kualitatif Manajemen PKL di sekolah.	Kurang detail dalam membedah fungsi POAC secara utuh (khususnya Organizing dan Actuating) dan tidak menggunakan pendekatan komparatif.
5	Haryani A. & Sunarto (2021)	Manajemen dan Evaluasi Program PKL di SMK Negeri 2 Kebumen	Manajemen berjalan baik, namun catatan penting pada tahap Evaluasi dan Pemantauan (Controlling) yang belum maksimal.	Meneliti Manajemen dan Evaluasi (POAC), khususnya aspek Controlling.	Bersifat evaluasi pada satu sekolah. penelitian ini fokus pada implementasi POAC secara komparatif di dua lokasi yang berbeda.

6	Lestari B. & Pardimin (2019)	Manajemen Kemitraan Sekolah dengan DU/DI untuk Meningkatkan Kompetensi Lulusan	Kemitraan yang efektif memerlukan manajemen yang baik, terutama pada tahap perencanaan dan pengawasan.	Relevan pada aspek kunci Pengorganisasian/ Kemitraan dan fokus pada peningkatan kompetensi.	Fokus pada kemitraan sebagai elemen utama. penelitian ini menggunakan POAC sebagai kerangka utama, di mana kemitraan adalah sub-aspek Perencanaan dan Pengorganisasian.
7	Yusuf IA dkk. (2025)	Fungsi Manajemen POAC dalam Pengelolaan Program PKL Industri di SMK Babussalam Pagelaran	Penerapan manajemen POAC yang menyeluruh dapat mempersiapkan siswa agar memiliki kompetensi profesional dan karakter tangguh.	Menggunakan kerangka POAC pada program PKL SMK.	Studi Kasus Tunggal. penelitian ini melakukan studi banding untuk menemukan pola manajemen yang lebih umum/adaptif.
8	Juri A. dkk. (2025)	Evaluasi Program Praktik Kerja Lapangan SMK Negeri 2 Padangsidimpuan (Model CIPP)	Secara keseluruhan program PKL masih dalam kategori cukup dan perlu perbaikan dari berbagai aspek, terutama aspek Proses	Fokus pada aspek Evaluasi/Controlling yang mengidentifikasi kelemahan dalam proses.	Campuran Penelitian Evaluatif (CIPP) dan Kuantitatif-Kualitatif. penelitian ini deskriptif kualitatif murni yang bertujuan mendeskripsikan proses manajemen,

			(pelaksanaan).		bukan mengukur skor keberhasilan.
9	Azizati LA (2016)	Profil Kompetensi Hard Skill dan Soft Skill Siswa Jurusan Tata Boga dalam Praktik Industri	Siswa lulusan SMK masih kurang menguasai kompetensi soft skill dan hard skill yang sesuai standar industri.	Fokus pada variabel hasil (Kompetensi Hard & Soft Skill) yang merupakan output manajemen PKL.	Penelitian deskriptif profil kompetensi pada satu jurusan. penelitian ini fokus pada Manajemen sebagai upaya untuk menciptakan profil kompetensi tersebut
10	Azzahra N. (2025)	Pengaruh PKL dan Hard Skill terhadap Kesiapan Kerja Siswa (Jurusan Manajemen Perkantoran)	PKL dan Hard Skill berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja.	Fokus pada variabel hasil dan Hard Skill.	Penelitian Kuantitatif (mencari pengaruh). penelitian ini Kualitatif (menganalisis bagaimana manajemen POAC memastikan terbentuknya Hard Skill dan Soft Skill).
11	Rahmatulla h N. dkk. (2022)	Implementasi Praktik Kerja Lapangan Sebagai Mata Pelajaran dalam Kurikulum Merdeka	PKL harus didasarkan pada naskah kerja sama, penempatan siswa sesuai konsentrasi, dan evaluasi fokus pada penguasaan kompetensi.	Relevan dengan konteks kebijakan Kurikulum Merdeka yang diadopsi sekolah saat ini.	Kajian ini fokus pada pedoman implementasi. penelitian ini mengkaji Manajemen operasional dalam mengadaptasi pedoman baru ini di tingkat sekolah.

12	Kahar DK & Titiarso (2021)	Pengelolaan Program PKL dalam Mendukung Peningkatan Kompetensi dan Karakter Siswa	Pengelolaan meliputi sosialisasi, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.	Program pengelolaan dan tujuan meningkatkan kompetensi.	Studi Kasus Tunggal dan tidak spesifik membedah POAC sebagai kerangka analisis.
13	Supriyati Y. & Sujarwo (2017)	Pengelolaan Praktik Kerja Industri (Prakerin)	Pengelolaan Prakerin yang optimal ditentukan oleh sinergi antara sekolah, siswa, dan industri.	Fokus pada Pengelolaan (Manajemen) yang menuntut sinergi.	Lebih fokus pada sinergi 3 pihak. penelitian ini menggunakan POAC sebagai alat analisis untuk membedah sinergi tersebut dalam setiap tahapan manajemen.
14	Setyaningsih W. et al. (2023)	Implementasi Manajemen Praktik Kerja Lapangan (PKL) Berbasis Teaching Factory (TeFa)	Model manajemen PKL yang terintegrasi TeFa dapat menjembatani kesenjangan kompetensi.	Relevan jika salah satu sekolah memiliki Teaching Factory, jika tidak, relevansinya pada manajemen integrasi.	Fokus pada Manajemen TeFa. penelitian ini fokus pada manajemen PKL di mitra industri (DU/DI), bukan internal sekolah TeFa.
15	Budiyanto (2021)	Evaluasi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan SMKN 1 Tambelangan	Pelaksanaan PKL sudah berjalan sangat baik sesuai rencana (dilihat dari motivasi, kesiagaan, dan	Penelitian evaluasi yang menggunakan aspek motivasi/karakter (soft skill) sebagai tolak ukur	Penelitian kuantitatif deskriptif di satu sekolah. penelitian ini kualitatif yang menggali alasan dibalik temuan

			tanggung jawab siswa).	keberhasilan.	tersebut, dan bersifat komparatif.
16	Nugroho RS dkk. (2020)	Manajemen Mutu PKL dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lulusan SMK	Manajemen mutu tekanan pada input (kesiapan siswa), proses (pelaksanaan yang terstandar), dan output (sertifikasi kompetensi).	Membawa kerangka Manajemen Mutu (yang bersinggungan dengan POAC).	Fokus pada Mutu dan Sertifikasi. penelitian ini fokus pada Implementasi POAC sebagai mekanisme untuk mencapai kualitas tersebut.
17	Wulandari A. & Suciati A. (2023)	Pengaruh Pengawasan dan Pembimbingan PKL terhadap Kompetensi Kerja Siswa	Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan (Controlling) dan pembimbingan terhadap kompetensi.	Mengisolasi fungsi Pengendalian sebagai variabel penting dalam manajemen PKL.	Kuantitatif dan fokus hanya pada aspek Controlling. penelitian ini menganalisis Controlling sebagai bagian integral dari POAC.
18	Maimun A. dkk. (2021)	Implementasi Manajemen Bimbingan dan Konseling (POAC) untuk Pelayanan Bimbingan Konseling yang Efektif	Menggunakan kerangka POAC dalam konteks pendidikan (layanan BK).	Menggunakan kerangka POAC di lingkungan sekolah, meskipun bukan untuk PKL.	Penelitian ini fokus pada layanan BK. penelitian ini menerapkan POAC pada Program PKL, yang memiliki tantangan manajemen yang berbeda (kemitraan DU/DI).
19	Elvi F. dkk. (2025)	Pengaruh Pengalaman PKL	Terdapat pengaruh yang signifikan	Fokus pada variabel hasil (kesiapan kerja).	Penelitian kuantitatif (mencari

		dan Minat Kerja terhadap Persiapan Kerja Siswa SMK	antara pengalaman PKL dan minat kerja terhadap kesiapan kerja.		pengaruh/korelasi). penelitian ini kualitatif dan fokus pada proses manajemen yang mendahului hasil.
20	Yogaswara SM dkk. (2023)	Pengaruh Kebijakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terhadap Kesiapan Kerja Peserta Didik	Kebijakan PKL memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan kerja.	Relevan pada aspek Kebijakan (Instrumental Input) dan Kesiapan Kerja (Outcome).	Penelitian kuantitatif (mengukur pengaruh). penelitian ini kualitatif (menganalisis manajemen POAC) sebagai pelaksanaan kebijakan.
21	Fitriani I. dkk. (2024)	Evaluasi Program Pelaksanaan PKL pada Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan	Menemukan kelemahan pada aspek sarana prasarana dan penentuan pembimbing (Input dan Perencanaan).	Penelitian evaluatif yang memperkuat perlunya perbaikan pada tahap Perencanaan dan Input.	Menggunakan model CIPP. penelitian ini menggunakan model manajemen POAC untuk menganalisis perbaikan dan membandingkan input serta perencanaan di dua sekolah.
22	Sucipto M. (2023)	Program Manajemen PKL dalam Menghadapi Tuntutan Industri 4.0	Kemitraan dengan industri yang relevan dan penggunaan teknologi dalam proses PKL	Relevan dengan Latar Belakang Masalah (Industri 4.0).	Lebih fokus pada aspek teknologi dan tuntutan industri. penelitian ini fokus pada POAC sebagai alat manajemen

			penting untuk menjawab Industri 4.0.		untuk menanggapi tuntutan tersebut.
23	Fauziah A. & Hasyim N. (2024)	Implementasi Manajemen Praktik Kerja Lapangan dalam Meningkatkan Soft Skill dan Hard Skill Siswa	Manajemen PKL yang terencana mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguasaan soft skill dan hard skill siswa	Fokus untuk meningkatkan kompetensi/soft & hard skill melalui manajemen PKL	Studi Kasus Tunggal. Penelitian ini menawarkan perbandingan bagaimana dua sekolah berbeda mencapai tujuan tersebut.
24	Setiawan Y. (2023)	Pengelolaan Pembekalan PKL dalam Menyiapkan Kesiapan Siswa SMK	Pembekalan merupakan fungsi kunci dalam Perencanaan dan Penggerakan yang sangat mempengaruhi kesiapan siswa.	Mengisolasi aspek Pembekalan yang merupakan bagian penting dari Perencanaan dan Penggerakan PKL.	Fokus pada Pembekalan. penelitian ini melihat Pembekalan sebagai satu elemen dalam siklus manajemen POAC yang lebih luas.
25	Sutiyana dkk. (2022)	Manajemen PKL dan Budaya Islam terhadap Perubahan Soft Skills Peserta Didik	Adanya faktor budaya (Budaya Islam) dan manajemen PKL yang mempengaruhi soft skill siswa.	Fokus pada aspek soft skill (Kompetensi) dan manajemen PKL.	penelitian ini fokus pada manajemen POAC holistik dan link & match tanpa menambahkan variabel Budaya Islam sebagai faktor pembeda eksklusif.

26	Orrell, J. (2019)	Manajemen Pembelajaran Terintegrasi Kerja (Work Integrated Learning/WIL) (Internasional)	Menekankan pentingnya Manajemen WIL yang efektif yang melibatkan kolaborasi antara institusi pendidikan dan tempat kerja, mencakup strategi pengelolaan pengalaman belajar (Organizing & Actuating) dan penilaian kemajuan siswa (Controlling).	Menyediakan kerangka konsep Manajemen (termasuk fungsi P, O, A, C) untuk program magang/WIL di tingkat internasional.	Fokus pada Pendidikan Tinggi (Universitas). Penelitian ini menerapkan prinsip manajemen ini di tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK), yang memiliki tantangan manajemen dan kesiapan siswa yang berbeda.
27	Billett, S. (2022)	Tujuan Pendidikan Kejuruan dan Pembelajaran Berbasis Kerja (Pembelajaran Berbasis Kerja/WBL) (Internasional)	Tujuan utama pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan individu untuk dunia kerja, dan WBL (seperti PKL) adalah metode yang paling efektif untuk mengembangkan pengetahuan,	Menguatkan landasan teori tentang pentingnya PKL/WBL dalam mencapai tujuan pendidikan kejuruan (VET).	Kajian Teoritis/Konseptual WBL secara umum. penelitian ini bersifat empiris dan spesifik membedah implementasi fungsi manajerial (POAC) untuk mengoptimalkan WBL tersebut di lapangan.

			keterampilan, dan kemampuan yang praktis bernilai bagi industri.		
28	Casey dan Wakeling (2022)	Peran Pemagangan (Magang) dalam Pengembangan Keterampilan Lunak (Soft Skills) (Internasional)	Model pemagangan, karena sifat yang terikat dengan situasi kerja (situated learning), secara unik diposisikan untuk menumbuhkan Soft Skills dan disposisi yang spesifik bidang, bukan hanya keterampilan teknis (hard skill).	Mendukung argumen kunci bahwa PKL adalah wadah utama pengembangan Soft Skills yang merupakan bagian dari Kompetensi Lulusan.	Fokus pada Soft Skill di lingkungan pemagangan yang terstruktur. penelitian ini menyelidiki bagaimana Manajemen POAC Sekolah memastikan pembelajaran ini terjadi di mitra industri mereka.
29	Cilliers dan Smit (2014)	Perbandingan Model Manajemen WIL Universitas Afrika Selatan dan Internasional (Internasional)	Mengidentifikasi keragaman model Manajemen WIL di berbagai institusi, menunjukkan bahwa tidak ada satu model tunggal yang sempurna. Perbedaan model manajemen	Memberikan legitimasi pada pendekatan komparatif (membandingkan dua SMK) untuk menemukan model manajemen yang paling sesuai dengan konteks lokal.	Fokus pada model di Perguruan Tinggi. Menerapkan logika perbandingan ini pada tingkat SMK, di mana perbedaan konteks sekolah (negeri vs swasta) akan menghasilkan model manajemen yang berbeda.

			dipengaruhi oleh konteks institusi dan kebutuhan industri.		
30	Darwanto (2020)	Pentingnya Keseimbangan Hard Skills dan Soft Skills Lulusan Perguruan Tinggi (Internasional/ Global)	Keberhasilan individu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis (hard skill), melainkan oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Menekankan perlunya keseimbangan kedua jenis keterampilan di era Revolusi Industri 4.0.	Menguatkan Variabel Hasil (Outcome) penelitian ini perlunya peningkatan kompetensi yang seimbang antara hard skill dan soft skill sebagai tujuan dari Manajemen PKL.	Penelitian ini bersifat konseptual/filosofis tentang tujuan pendidikan. Penelitian empiris-kualitatif yang menyelidiki proses manajemen (POAC) sebagai strategi praktis untuk mencapai keseimbangan kompetensi tersebut di dua lokasi.